

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2017 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2017. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral;
10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang politik luar negeri;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoo Pollugri, dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoo Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Hukum dan HAM;

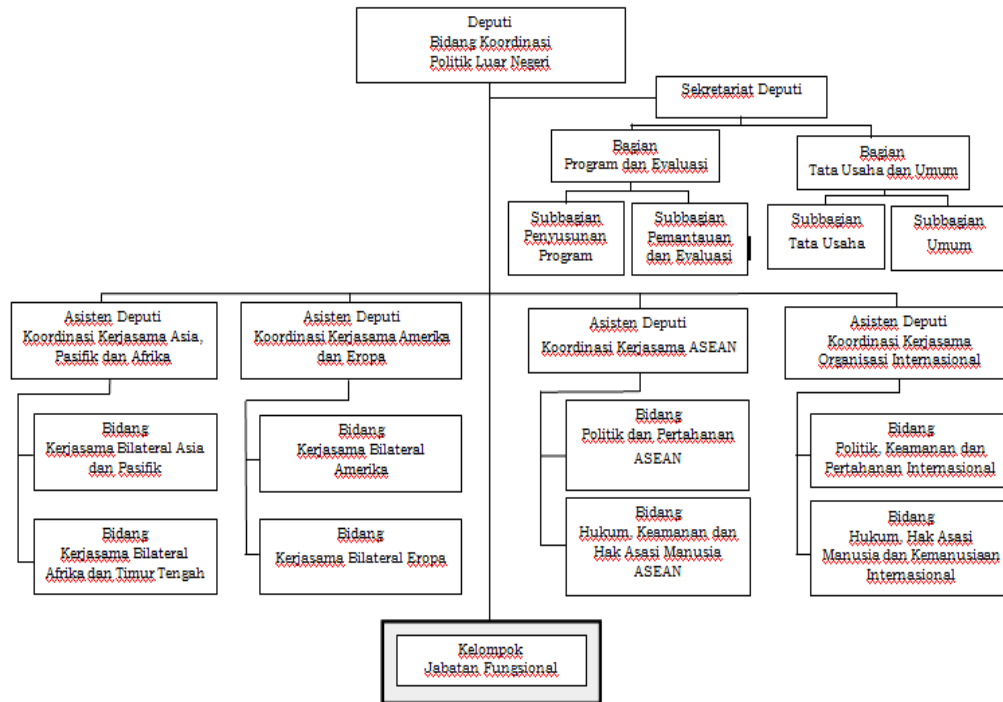
5. Kementerian Kominfo;
6. Kementerian PAN & RB;
7. Kejaksaan Agung;
8. Badan Intelijen Negara
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara RI;
11. Instansi lain yang dianggap perlu.

C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
 - a. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
 - b. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
 - c. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama ASEAN;
 - d. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional;
2. Masing-masing asisten Deputy dibantu oleh 2 orang Bidang Kerjasama Bilateral ASEAN, Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Bidang Kerjasama Amerika, Bidang Kerjasama Eropa, Bidang Kerjasama Organisasi Internasional PBB, Bidang Kerjasama Organisasi Internasional Non PBB dan Antar Kawasan.
3. Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari 1 (satu orang) Sekretaris Deputy setingkat Eselon II dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, 3 orang Analis dan 6 orang staf Sekretariat.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDKOOR POLLUGRI



BAB II PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas Diplomasi dan Kerjasama luar negeri Indonesia	a. Persentase Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan Negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak terhadap Indonesia	92%
	b. Persentase diplomasi Indonesia yang sukses	92%
	c. Jumlah permasalahan antar Negara yang teredam	4
	d. Implementasi Blueprint APSC 2025	3
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penurunan jumlah temuan	60%
	b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	95%
	c. Nilai akuntabilitas kinerja	75%

Perjanjian Kinerja Kedeputan II Tahun 2017 tersebut diimplementasikan melalui program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang politik luar negeri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa
3. Koordinasi kerjasama ASEAN
4. Koordinasi kerjasama Organisasi Internasional

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung kegiatan bidang koordinasi politik luar negeri adalah sebesar Rp 6.114.058.000,- (*enam milyar seratus empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada tahun 2017 dapat terlihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan			
		Target	Realisasi Tahun 2016	Target	Realisasi Tahun 2017
1. Meningkatnya kualitas Diplomasi dan Kerjasama luar negeri Indonesia	a. Persentase Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan Negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak terhadap Indonesia	90%	90%	92%	100 %
	b. Persentase diplomasi Indonesia yang sukses	90%	90%	92%	100%
	c. Jumlah permasalahan antar Negara yang teredam	3	3	4	4
	d. Implementasi <i>Blueprint</i> APSC 2025	1	1	3	8
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penurunan jumlah temuan	50%	50%	60%	100%
	b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	94%	94%	95%	99,63%
	c. Nilai akuntabilitas kinerja	70	70%	75	73,13%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Diplomasi dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia

a. Indikator Kinerja 1 : Persentasi Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak terhadap Indonesia.

- 1) Pertemuan *Sub-regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism* (SRM on FTF & CBT).

Pertemuan SRM on FTF & CBT dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2017 oleh Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Australia dan K/L terkait di Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut hasil IMCT dan *Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security* ke-2 antara Menko Polhukam dengan Jaksa Agung Australia di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017. Pertemuan diadakan sebagai bentuk antisipasi meningkatnya pergerakan FTF berafiliasi dengan ISIS ke kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah laut Sulu dan Laut Sulawesi. Pertemuan menghasilkan *joint statement* yang memuat langkah-langkah dalam penanggulangan terorisme khususnya FTF dan CBT antara lain peningkatan kerjasama dengan masyarakat madani; peningkatan kerjasama antara *financial intelligence units* (FIU), termasuk melalui KTT dan peran sektor swasta untuk menanggulangi pendanaan terorisme; penguatan peran perempuan; pentingnya pendidikan; pembangunan ekonomi; pengelolaan penjara; peningkatan program deradikalisasi; dan penyusunan narasi untuk menanggulangi propaganda dari kelompok/pelaku terorisme. Sebagai tindaklanjut, *working group* dengan basis di Jakarta yang beranggotakan perwakilan pejabat senior dari 6 negara peserta SRM antara lain Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Selandia Baru telah mengadakan pertemuan rutin untuk

melaksanakan langkah-langkah yang diamanatkan dalam hasil *joint statement* dimaksud.

2) Pertemuan *Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security* (IAMCLS)

Pertemuan IAMCLS merupakan pertemuan bilateral antara Menko Polhukam dengan Jaksa Agung Australia yang diadakan sebagai upaya konkrit untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya bidang penanggulangan terorisme, intelijen dan *cyber security*. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 2015. Pertemuan ke-4 dilaksanakan di Brisbane, Australia pada tanggal 25-26 November 2017, dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang dimuat dalam sebuah *joint statement* antara lain peningkatan kerjasama dibidang hukum dan keamanan RI – Australia; kesiapan memberantas ancaman terorisme regional dan sub-regional; penguatan kerjasama penanggulangan kejahatan pembiayaan terorisme; serta penguatan kerjasama penegakkan hukum.

3) Forum Konsultasi Bilateral Menko Polhukam dengan State Councilor RRT.

Pertemuan Forum Konsultasi Bilateral Menko Polhukam dengan State Councilor RRT yang bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama di bidang politik, hukum dan keamanan kedua negara. Pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Pertemuan ke-6 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 di Beijing, RRT dan menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain peningkatan hubungan bilateral RI – RRT; peningkatan kerjasama politik dan keamanan; penguatan kerjasama penanggulangan terorisme; peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan narkoba; penguatan kerjasama keamanan siber; penguatan kerjasama maritim; serta kerjasama antariksa.

- 4) Kunjungan Kerja Khusus Menko Polhukam ke Myanmar pada tanggal 4-5 Desember 2017

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI mengenai upaya kerjasama *counter terrorism* dengan Myanmar. Dalam kunjungan kerja tersebut Menko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Myanmar untuk mengembangkan kerjasama bilateral menghadapi ancaman gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di Myanmar. Kunjungan ditindaklanjuti dengan pertemuan Menko Polhukam dengan national *Security Adviser* Myanmar di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017 serta Rapat Koordinasi Terbatas antara Kemenko Polhukam dengan Kemlu, Polri dan BNPT dalam rangka mendiskusikan kerjasama konkrit yang dapat dilaksanakan RI dengan Myanmar, khususnya dalam bidang *capacity building*. Program kerjasama ini akan dilaksanakan pada tahun 2018.

- 5) Kerjasama Bidang Keamanan yang diimplementasikan melalui Pertemuan Konsultasi Bilateral Bidang Keamanan, antara Kemenko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia yang diselenggarakan setiap tahunnya.
- 6) Kerjasama bidang Counter Terrorism RI – Turki yang dibahas melalui RPTM tanggal 16 Oktober 2017 mengenai tindaklanjut hasil kunjungan Presiden ke Turki, dan sebagai tindaklanjut dari hasil RPTM tersebut telah dibuat surat rekomendasi kepada Presiden perihal pendeportasian Warga Negara Turki yang telah dicabut paspornya oleh Pemerintah Turki (karena diduga sebagai anggota kelompok teroris FETO).
- 7) Kerjasama dengan Amerika Serikat dalam pengiriman sejumlah relawan *Peace Corps* ke Jawa Timur, Jawa Barat, serta NTT untuk bertugas mendampingi guru bahasa Inggris setempat dalam memberikan pengajaran Bahasa Inggris.
- 8) Konsultasi Bilateral Khusus membahas International Information Security (IIS), yang merupakan pertemuan konsultasi bilateral yang diketua oleh pejabat setingkat Dirjen (Eselon I). Konsultasi bilateral khusus IIS yang pertama diselenggarakan di Jakarta, dengan Kemenko Polhukam sebagai tuan rumahnya. Konsultasi Bilateral

tersebut menghasilkan adalah *Counter Draft Mou* serta *Joint Statement* yang telah disusun oleh Kemenko Polhukam bersama K/L teknis lainnya pada bulan November 2017. Sebagai tindaklanjut konsultasi bilateral tersebut, rencananya konsultasi bilateral khusus mengenai IIS yang ke 2 akan diselenggarakan di Rusia pada semester pertama tahun 2018

- 9) Ratifikasi ASEAN *Concentration Against Trafficking in Person Especially Women and Children* melalui UU Nomor 12 Tahun 2017.
- 10) Pertemuan Deputy II Pollugri dengan Mr. Richard Maude, *Head of Foreign Policy White Paper Taskforce* pada tanggal 17 Januari 2017.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia saat ini sedang menyusun sebuah Buku Putih tentang Kebijakan Luar Negeri Australia (*Foreign Policy White Paper*). Buku putih ini akan diterbitkan menjadi sebuah dokumen public. Buku putih tetap akan menekankan pentingnya *commitment* Australia terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan. Di kalangan masyarakat Australia yang tercatat masih memiliki pandangan negative terhadap Indonesia.

Berdasarkan Indikator Kinerja 1 presentasi kerjasama luar negeri Indonesia dengan negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak terhadap Indonesia realisasinya telah mencapai 100 % (melampaui target). Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi Kemenko Polhukam melalui rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja dan *Forum Group Discussion* selama Tahun 2017.

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase diplomasi Indonesia yang sukses

- 1) Pertemuan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dengan Menteri Xanana Gusmao pada bulan 12 Juni 2017 di Jakarta :

Disetujui pembentukan *Senior Official Consultation* (SOC) dan menugaskan Wamenlu Roberto Soares sebagai wakil RDTL. SOC mempunyai mandat untuk memberikan masukan opini kepada Menteri Wiranto dan Menteri Xanana, dan bukan untuk menyelesaikan *unresolved segments* kedua wilayah.

- 2) Indonesia – Australia *Ministerial Council on Law and Security* di Jakarta 2 Februari 2017 pertemuan menghasilkan *joint statement* yang berisi komitmen tinggi dan *practical solution* dalam penegakkan hukum dan keamanan guna mengatasi berbagai ancaman kejahatan lintas negara terutama aksi terorisme.
- 3) Pertemuan Indonesia – *India security dialog* di New Delhi, pertemuan telah berhasil meningkatkan kerjasama antara RI – India di bidang penanggulangan terorisme pada bulan September – Oktober 2017.

Bahwa berdasarkan Indikator Kinerja 2 persentase diplomasi Indonesia yang sukses realisasinya telah mencapai 100% (melampaui target). Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi Kemenko Polhukam melalui rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja dan *Focus Group Discussion* selama Tahun 2017.

c. Indikator Kinerja 3 : Jumlah permasalahan antar negara yang teredam

- 1) Perundingan Batas Wilayah RI – Timor Leste di Nowel Besi – Citrana yang sama sekarang belum terselesaikan.
- 2) Perlindungan bangkai kapal perang Australia HMS Pert di Selat Sunda yang sampai sekarang belum terselesaikan.
- 3) Perlindungan bangkai kapal perang Amerika USS Auston di Laut Jawa yang sampai sekarang belum terselesaikan.
- 4) Realiasi Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk menghibahkan 100 (seratus) traktor tangan kepada pemerintah Fiji sampai sekarang belum terealisasi, karena belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI.

Bahwa berdasarkan Indikator Kinerja 3 jumlah permasalahan antar negara teredam realisasinya sebanyak 4 permasalahan (mencapai target). Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi Kemenko Polhukam melalui rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja dan *Focus Group Discussion* selama Tahun 2017.

d. Indikator Kinerja 4 : Implementasi Blueprint APSC 2025

ASEAN *Political-Security Community* (APSC) atau yang sering dikenal dengan cetak biru komunitas politik keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*).

Konsep Cetak Biru APSC disusun berdasarkan kesepakatan KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura untuk menggantikan VAP 2004-2010. Konsep tersebut telah disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, tahun 2009, dan dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (*Cha-am, Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community*). Cetak Biru APSC tersebut terdiri atas 3 karakteristik, 11 elemen, dan 137 tindakan yaitu:

- 1) Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (*A Rules-based Community of Shared Values and Norms*) terdiri dari 3 elemen dan dijabarkan dalam 58 tindakan;
- 2) Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (*A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security*) terbagi dalam 6 elemen dan 71 tindakan; dan
- 3) Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (*A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World*) yang dijabarkan dalam 3 elemen dan 8 tindak.

Kerja sama dalam kerangka APSC, sebagaimana termuat dalam cetak birunya, dielaborasi lebih spesifik dalam kerja sama bidang politik, keamanan, dan hukum yang mencakup spektrum yang luas dari permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya untuk memajukan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

menangani masalah terorisme, menanggulangi bencana alam, dan memberantas korupsi.

Implementasi APSC Blue print 2025 dimulai pada tahun 2015 setelah APSC Blue Print 2009-2015 selesai. Implementasi langkah aksi APSC Blue print di Indonesia pada tahun 2015 ialah sebanyak 8 aksi, pada tahun 2016 sebanyak 3 aksi dan pada tahun 2017 sebanyak langkah aksi. Adapun implementasi langkah aksi pada tahun 2017 diantaranya adalah:

- 1) Implementasi langkah aksi A.2.5.iv *Support the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in the discharge of its mandate, in accordance with its Terms of Reference (TOR)*; melalui pertemuan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* telah menyelenggarakan *23rd Meeting of AICHR* di Boracay, Filipina, 13 – 15 Februari 2017 dan pelaksanaan FGD “Peran AICHR Dalam Menghadapi ASEAN *Community Vision 2025*” pada 8 Maret 2017 di Jakarta oleh Kemenko Polhukam bekerjasama dengan AICHR Indonesia.
- 2) Implementasi langkah aksi A.i. *Align and consolidate the agenda and priorities of relevant ASEAN Sectoral Bodies under the APSC Pillar with those of the ASEAN Community Vision 2025 and the APSC Blueprint 2025*; melalui kegiatan rapat koordinasi pembahasan implementasi Cetak Biru Pilar Politik dan Keamanan ASEAN 2025 dan persiapan review Piagam ASEAN bersama dengan para pemangku kepentingan pada Januari 2017 di Bandung, Jawa Barat.
- 3) Implementasi langkah aksi B.6.1.i *Continue ASEAN current practice of close consultation among ASEAN Member States on matters pertaining to the South China Sea, including the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) and the Code of Conduct in the South China Sea (COC)*; melalui *19th ASEAN-China Joint Working Group Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DoC)* pada 26-27 Februari 2017 di Bali dan pertemuan *21st JWG on South China Sea, 23rd China Senior Officials Consultation, dan 14th*

SOM on the Implementation of DoC di Guiyang RRT, dimana Kemenko Polhukam berpartisipasi aktif selaku anggota Delri.

- 4) Implementasi langkah aksi D.2.2.iii *Ensure ASEAN awareness-raising activities and programmes are gender-sensitive and accessible to all segments of society, including persons with disabilities and other vulnerable groups*; melalui penyelenggaraan kegiatan diseminasi informasi Masyarakat ASEAN di Padang Sumbar bekerjasama dengan PSA Universitas Andalas pada 24 Maret 2017 dan di Banda Aceh, NAD, bekerja sama dengan PSA Unsyiah pada 7 September 2017.
- 5) Implementasi langkah aksi B.1.3.ii Mengimplementasikan secara efektif *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan di laut, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan dunia maya melalui Kegiatan Sosialisasi Hasil Tindak Lanjut Pertemuan *11th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* dan *2nd Special ASEAN Ministerial Meeting on the Rise of Radicalization and Violent Extremism (SAMRRVE)*, di Bogor, 6 Oktober 2017.
- 6) Implementasi langkah aksi A.1.5 Memajukan kesadaran mengenai masyarakat yang berorientasi pada rakyat dan berpusat dengan kegiatan Diseminasi Masyarakat Polkam ASEAN bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan di Tarakan Kaltara pada 17 Oktober 2017.
- 7) Implementasi langkah aksi B.1.1.ii Meningkatkan peran Dewan APSC (APSC Council) dengan cara lebih memfokuskan pada isu-isu substantif dan strategis serta menangani isu-isu lintas sektoral dan lintas pilar yang berada dalam lingkungannya secara efektif melalui kehadiran Menko Polhukam selaku ketua Delri pada pertemuan APSC Council Meeting ke-16 pada 12 November 2017
- 8) Implementasi langkah aksi B.1.1.ii Meningkatkan peran Dewan APSC (APSC Council) dengan cara lebih memfokuskan pada isu-isu substantif dan strategis serta menangani isu-isu lintas sektoral dan

lintas pilar yang berada dalam lingkungannya secara efektif melalui Rapat Koordinasi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN pada Setnas ASEAN Indonesia pada 12 Desember 2017 di Bogor, Jawa Barat.

Menko Polhukam juga berkesempatan hadir sebagai perwakilan Indonesia pada pertemuan *APSC Council Meeting* ke-15 di Manila, Filipina dan rangkaian KTT ASEAN ke-30 guna menyampaikan capaian dan isu-isu prioritas di Pilar Polkam ASEAN.

Sebagai salah satu pemelopor *APSC Blueprint*, Indonesia terus mendorong implementasi kesepakatan dalam Pilar Politik-Keamanan ASEAN dalam rangka mewujudkan masyarakat ASEAN yang *rules-based*, *people oriented* dan *people centered*. Untuk itu, Kemenko Polhukam akan berkomitmen mengimplementasikan langkah aksi pada *APSC Blue print 2025* yang mana di dalamnya terdapat 290 langkah aksi.

Dengan demikian berdasarkan Indikator Kinerja 4, Implementasi *Blueprint APSC 2025* telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan (melampaui target). Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi Kemenko Polhukam melalui rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja dan *Focus Group Discussion* selama Tahun 2017.

2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

- a. Tidak adanya temuan pada program anggaran dan kegiatan milik Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada tahun 2017, membuktikan bahwa dalam penyusunan program dan anggaran sudah tertib administrasi.
- b. Barang Milik Negara yang ada pada Deputy Bidkooor Politik Luar Negeri dalam keadaan kondisi yang baik, hal ini membuktikan bahwa Deputy Bidkooor Politik Luar Negeri menjaga asset BMN dengan baik dan jika ada kerusakan, maka hal ini segera dilaporkan kepada Bagian Rumah Tangga.
- c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidkooor Politik Luar Negeri memperoleh nilai 73,13 %.

- d. Realisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan TA 2017 sudah mencapai 96,63% dari target yang ditentukan untuk tahun anggaran 2017.

3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran kegiatan Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 6.114.058.000,- (*enam milyar seratus empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah*), telah diserap sebesar Rp. 6.091.204.322,- (*enam milyar sembilan puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*). Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 99,63%, dengan perincian sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	888.420.000	884.436,896	99,55
	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika	1.292.778.000	1.000.698.756	99,76
	Koordinasi Kerjasama Amerika & Eropa	1.003.082.000	1945.380.368	99,85
	Koordinasi Kerjasama ASEAN	1.948.400.000	1.290.546.853	99,83
	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	803.558.000	970.141.449	98,86
	Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	6.114.058.000	6.091.204.322	99,63

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun Anggaran 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2017 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Jakarta, Januari 2018